



XINHUA

PESERTA KONFERENSI BAGHDAD UNTUK KERJA SAMA

Peserta yang menghadiri Konferensi Baghdad untuk Kerja Sama dan Kemitraan berfoto bersama di Sweimeh, Yordania, Selasa (20/12). Para peserta yang menghadiri Konferensi Baghdad untuk Kerjasama dan Kemitraan pada hari Selasa menyerukan dukungan yang lebih kuat bagi Irak untuk membantunya menjaga keamanan dan stabilitas dan mencapai pembangunan yang komprehensif.

Sejumlah Negara Diduga Selewengkan Penggunaan Data dan Aplikasi Covid

Aplikasi pelacakan diduga dimanfaatkan untuk mengecek perbedaan pendapat.

YERUSALEM(IM) – Sejumlah negara di dunia diduga telah menyalahgunakan aplikasi dan data pelacakan penyebaran Covid-19. Data tersebut disleweungkan untuk mengecek perbedaan pendapat hingga menyelidiki kejahatan.

Selama lebih dari setahun terakhir, Associated Press (AP) mewawancarai sumber dan meneliti ribuan dokumen untuk menyingkap bagaimana produk teknologi yang dibuat dengan maksud kepentingan penanganan Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Israel menjadi salah satu negara yang diduga melakukan hal tersebut. Badan keamanan internal Israel, Shin Bet, memiliki teknologi pengawasan telepon yang digunakan untuk memantau warga terduga anggota kelompok militansi di dalam wilayah Palestina.

Saat pandemi merebak, teknologi pengawasan Shin Bet itu digunakan untuk pelacakan rantai kontak Covid-19. "Anda terlihat berpartisipasi dalam aksi

kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Kami akan meminta pertanggungjawaban Anda," demikian bunyi pesan berbahasa Arab yang masuk ke ponsel milik Ramlawi belum lama ini.

Banyak orang, termasuk Ramlawi, mengaku mereka hanya tinggal atau bekerja atau bahkan hanya sekedar lewat di dekat lokasi kerusuhan. Mereka mengklaim sama sekali tak terlibat dalam aksi bentrokan.

Tiongkok pun diduga melakukan tindakan penyalahgunaan serupa. Sebagai negara pertama dalam rantai penyebaran Covid-19, warga di sana diharuskan memasang aplikasi agar bisa bergerak bebas di sebagian besar kota. Berdasarkan data telekomunikasi dan hasil tes PCR, aplikasi tersebut menghasilkan kode QR individu yang berubah dari hijau menjadi kuning atau merah, tergantung pada status kesehatan seseorang.

Kini, saat pembatasan pandemic di Tiongkok berkurang, ada bukti bahwa kode kesehatan telah digunakan untuk melumpuhkan perbedaan pendapat. Warga yang ingin mengajukan pengaduan terhadap pemerintah tiba-tiba menemukan kode mereka menjadi merah. Padahal mereka tidak dinyatakan positif Covid-19 atau menjalin kontak dekat dengan individu yang terinfeksi.

Sementara di India, pada awal Mei 2020, kepolisian di Negara Bagian Telangana meluncurkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan menggunakan CCTV untuk membidik warga yang tak mengenakan masker. S Q Masood, seorang aktivis sosial, termasuk di antara orang-orang yang dihentikan secara acak oleh polisi di daerah mayoritas Muslim di Hyderabad tahun lalu.

Masood mengatakan petugas menyuruhnya melepas maskernya agar mereka bisa memotretnya dengan tablet. Dia sekarang menuntut polisi untuk memperoleh penjelasan di balik tindakan tersebut.

Meskipun penegak hukum menyangkal menggunakan pengenalan wajah dalam kasus Masood, gugatan tersebut terus berlanjut. Para ahli di sana berpendapat hal itu dapat menjadi preseden untuk kegiatan kepolisian di masa depan.

Selain itu, Penyalahgunaan aplikasi penanganan Covid-19 juga diduga terjadi di Australia. Warga di Negeri Kanguru harus memindai ponsel mereka dengan kode QR jika ingin mengunjungi restoran, tempat pertunjukan, dan ruang publik lainnya. Hal itu sebagai bukti kehadiran mereka di tempat-tempat terkait. Dengan demikian, jika terdapat kasus Covid-19 terdeteksi di salah satu tempat, otoritas kesehatan dapat segera menghukum mereka.

Namun dalam banyak kasus, aparat penegak hukum Australia diduga mengkooptasi data check-in QR tingkat negara bagian sebagai semacam jaringan elektronik untuk menyelidiki kejahatan. Praktik tersebut dilakukan meskipun ada jaminan dari pemerintah bahwa informasi tersebut hanya akan digunakan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat.

Amerika Serikat (AS) juga berpotensi melakukan penyalahgunaan. Pada 2020, Negeri Paman Sam menandatangani kontrak senilai 24,9 juta dolar AS dengan perusahaan penambangan dan pengawasan data Palantir Technologies Inc. Tujuannya mendukung departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan dalam merespons pandemic.

Kelompok hak migran Just Futures Law memperoleh dokumen kesepakatan kontrak itu di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi AS atau Freedom of Information Act.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa para pejabat federal AS mempertimbangkan untuk mengintegrasikan "data pasien yang dapat diidentifikasi" seperti kesehatan mental, penggunaan zat dan informasi kesehatan perilaku dari rumah kelompok, tempat penampungan, penjara, fasilitas detoks dan sekolah. Pusat Pengendalian Penyakit AS atau The U.S. Centers for Disease Control (CDC) tidak menggunakan informasi tingkat individu apa pun di platform yang sekarang dikelola CDC.

"Apa yang dilakukan Covid adalah mempercepat penggunaan alat-alat ini dan data tersebut oleh negara dan menormalkannya, sehingga sesuai dengan narasi tentang adanya manfaat publik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan mampu memperhitungkan penggunaan data ini, atau apakah ini normal baru?" kata John Scott-Railton, peneliti senior di organisasi pengawas internet Citizen Lab yang berbasis di Toronto, Kanada. ● tom

Selama lebih dari setahun terakhir, Associated Press (AP) mewawancarai sumber dan meneliti ribuan dokumen untuk menyingkap bagaimana produk teknologi yang dibuat dengan maksud kepentingan penanganan Covid-19 dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Israel menjadi salah satu negara yang diduga melakukan hal tersebut. Badan keamanan internal Israel, Shin Bet, memiliki teknologi pengawasan telepon yang digunakan untuk memantau warga terduga anggota kelompok militansi di dalam wilayah Palestina.

Saat pandemi merebak, teknologi pengawasan Shin Bet itu digunakan untuk pelacakan rantai kontak Covid-19. "Anda terlihat berpartisipasi dalam aksi

kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Kami akan meminta pertanggungjawaban Anda," demikian bunyi pesan berbahasa Arab yang masuk ke ponsel milik Ramlawi belum lama ini.

Banyak orang, termasuk Ramlawi, mengaku mereka hanya tinggal atau bekerja atau bahkan hanya sekedar lewat di dekat lokasi kerusuhan. Mereka mengklaim sama sekali tak terlibat dalam aksi bentrokan.

Tiongkok pun diduga melakukan tindakan penyalahgunaan serupa. Sebagai negara pertama dalam rantai penyebaran Covid-19, warga di sana diharuskan memasang aplikasi agar bisa bergerak bebas di sebagian besar kota. Berdasarkan data telekomunikasi dan hasil tes PCR, aplikasi tersebut menghasilkan kode QR individu yang berubah dari hijau menjadi kuning atau merah, tergantung pada status kesehatan seseorang.

Kini, saat pembatasan pandemic di Tiongkok berkurang, ada bukti bahwa kode kesehatan telah digunakan untuk melumpuhkan perbedaan pendapat. Warga yang ingin mengajukan pengaduan terhadap pemerintah tiba-tiba menemukan kode mereka menjadi merah. Padahal mereka tidak dinyatakan positif Covid-19 atau menjalin kontak dekat dengan individu yang terinfeksi.

Sementara di India, pada awal Mei 2020, kepolisian di Negara Bagian Telangana meluncurkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan menggunakan CCTV untuk membidik warga yang tak mengenakan masker. S Q Masood, seorang aktivis sosial, termasuk di antara orang-orang yang dihentikan secara acak oleh polisi di daerah mayoritas Muslim di Hyderabad tahun lalu.

Masood mengatakan petugas menyuruhnya melepas maskernya agar mereka bisa memotretnya dengan tablet. Dia sekarang menuntut polisi untuk memperoleh penjelasan di balik tindakan tersebut.

Meskipun penegak hukum menyangkal menggunakan pengenalan wajah dalam kasus Masood, gugatan tersebut terus berlanjut. Para ahli di sana berpendapat hal itu dapat menjadi preseden untuk kegiatan kepolisian di masa depan.

Pengadilan Jerman Hukum

Mantan Sekretaris di Kamp Nazi

BERLIN(IM) - Pengadilan Jerman, memvonis bersalah seorang perempuan berusia 97 tahun karena terlibat dalam lebih dari 10 ribu pembunuhan. Dia berperan sebagai sekretaris komandan SS kamp konsentrasi Nazi di Stutthof selama Perang Dunia II.

Furchner diadili di pengadilan anak-anak karena dia berusia 18 hingga 19 tahun pada saat dugaan kejahatan dan pengadilan tidak dapat membuktikan dengan pasti kedewasaan pikirannya pada saat dugaan pelanggaran. Namun Gross tetap mencatat, bahwa dia bisa saja mengundurkan diri dari posisinya kapan saja. Furchner tidak hadir untuk memulai persidangan pada September 2021. Namun polisi kemudian menjemputnya dan dia ditahan selama beberapa hari.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Stephane Dujarric mengatakan, putusan itu menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan dengan tindakan mengerikan seperti itu.

Jaksa di Itzehoe mengatakan selama persidangan, bahwa persidangan Furchner mungkin yang terakhir dari jenisnya. Namun, kantor kejaksaan federal khusus di Ludwigsburg yang bertugas menyelidiki kejahatan perang era Nazi mengatakan, jaksa penuntut di berbagai bagian Jerman memiliki lima kasus lagi yang tertunda.

Sejak pertengahan 1944, puluhan ribu orang Yahudi dari ghetto di Baltik dan dari Auschwitz memenuhi kamp. Mereka dikumpulkan di sana bersama dengan ribuan warga sipil Polandia yang tersapu dalam penindasan Nazi yang brutal atas pemberontakan.

Orang lain yang dipenjarakan di sana termasuk tahanan politik, penjahat yang dituduh, orang yang dicurigai melakukan aktivitas homoseksual, dan Saksi-Saksi Yehuwa. Lebih dari 60 ribu orang tewas di kamp tersebut. ● gul

Inggris Kekurangan Telur, Pembelian Dijatah

LONDON(IM) - Industri telur Inggris menunjukkan keterpurukannya akibat inflasi yang tinggi. Perang di Ukraina telah mendorong biaya energi dan pakan ayam yang lebih tinggi, sehingga para peternak tidak sanggup memproduksi dan mengangkut ekonomi makanan pokok utama itu.

Banyak supermarket di Inggris, termasuk Tesco Asda, yang telah menjatah penjualan mereka telur menyalahkan serangan flu burung yang telah merusak ternak di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan Inggris kekurangan telur.

Peternak Inggris berpendapat, meski wahab flu burung adalah salah satu faktornya, tidak ada cukup telur karena banyak yang kehilangan uang dan memaksa mereka untuk memangkas produksi. Bahkan sebagian berhenti sama sekali.

Asosiasi tersebut memperkirakan total kawanan petelur Inggris turun 6 persen menjadi 36,4 juta selama 12 bulan terakhir. Ini menunjukkan pasokan yang lebih ketat ke depan.

Salah seorang peternak di Inggris, Frank Thompson mengatakan bahwa tahun lalu dia memangkas jumlah ayam busur di peternakannya di Burton-on-Trent, Inggris tengah untuk membatasi kerugiannya. Pada Oktober dia sudah merasa cukup, dan membenarkan pembentahan 12 bulan yang diperlukan dalam kontrak dengan pembelinya.

Pembeli, yang mengemas dan menjual telur ke supermarket, menawarkan 15 pence per lusin lebih sebagai tanggapan, yang menurut Thompson masih membuatnya rugi. "Mengapa kita berkomitmen untuk itu? Terus terang saya kaget. Pengecerlah yang memegang dompet," katanya.

Didorong oleh permintaan konsumen, produsen telur Inggris selama bertahun-tahun berfokus pada free range, yang sekarang mewakili 70 persen pasar. Namun dengan hanya 13 persen telur di kisaran bebas Uni Eropa, opsi untuk mengisi kekosongan di rak supermarket Inggris dengan impor terbatas.

Pembeli, yang mengemas dan menjual telur ke supermarket, menawarkan 15 pence per lusin lebih sebagai tanggapan, yang menurut Thompson masih membuatnya rugi. "Mengapa kita berkomitmen untuk itu? Terus terang saya kaget. Pengecerlah yang memegang dompet," katanya.

Didorong oleh permintaan konsumen, produsen telur Inggris selama bertahun-tahun berfokus pada free range, yang sekarang mewakili 70 persen pasar. Namun dengan hanya 13 persen telur di kisaran bebas Uni Eropa, opsi untuk mengisi kekosongan di rak supermarket Inggris dengan impor terbatas.

berfokus pada free range, yang sekarang mewakili 70 persen pasar. Namun dengan hanya 13 persen telur di kisaran bebas Uni Eropa, opsi untuk mengisi kekosongan di rak supermarket Inggris dengan impor terbatas.

Serikat Petani Nasional Inggris (NFU) mengatakan kekurangan telur bisa jadi hanya permulaan. Karena era baru energi dan biji-bijian yang mahal dikombinasikan dengan kekurangan tenaga kerja dapat menyebabkan lebih banyak rak kosong kecuali produsen dan pengecer makanan menyetujui persyaratan yang lebih adil untuk masa depan.

Ketika inflasi dua digit telah mempererat hubungan antara produsen dan pengecer di seluruh dunia, persaingan yang ketat di antara pengecer makanan Inggris telah membuat harga di bawah rata-rata Eropa dan margin keuntungan mereka berada di antara yang terendah.

Tak hanya itu, para pengecer juga mengeluhkan krisis biaya hidup yang dipicu oleh melonjaknya biaya makanan dan energi. Ini membatasi ruang mereka untuk bermanuver. Produsen telur mengatakan, kalau pun supermarket menaikkan harga eceran dan membayar peternak lebih banyak, kenaikan itu tidak cukup untuk menutup biaya yang melekat. ● ans

Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah

KABUL(IM) - Penguasa Taliban melarang perempuan di Afghanistan untuk mengenakan pendidikan di perguruan tinggi. Ini adalah dekret terbaru Taliban yang meniadakan hak dan kebebasan perempuan.

Keputusan itu diumumkan setelah rapat pemerintah. Sebuah surat yang dibagikan oleh juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi, Ziaullah Hashmi, mengatakan kepada universitas swasta dan negeri untuk menerapkan larangan tersebut sesegera mungkin. Hashmi mengunggah surat itu di Twitter dan mengonfirmasi isinya dalam sebuah pesan kepada The Associated Press tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Keputusan tersebut akan menghalangi upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dari calon donor internasional pada saat Afghanistan terpeleceh dalam krisis kemanusiaan yang memburuk. Komunitas internasional telah mendesak para pemimpin Taliban untuk membuka kembali sekolah, dan memberikan hak kepada perempuan di ruang publik. Larangan masuk universitas terjadi beberapa minggu setelah para siswa perempuan Afghanistan mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah atas.

"Saya tidak bisa memenuhi impian saya, harapan saya. Semuanya menghilang di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa," kata seorang mahasiswa jurnalistik dan komunikasi tahun ketiga di Universitas Nangarhar yang berbicara dengan syarat anonim. "Apakah menjadi seorang gadis adalah kejahatan? Jika itu masalahnya, saya berharap saya bukan seorang gadis. Ayah saya punya impian bahwa putrinya akan menjadi jurnalis berbakat di masa depan. Yang terjadi sekarang (impian itu) hancur. Jadi, ben tahu saya, bagaimana menjadi seseorang dalam situasi ini?" ujar mahasiswa perempuan itu menambahkan.

Meski Taliban melarang perempuan mengakses perguruan tinggi, dia belum kehilangan semua harapan. Dia bertekad melanjutkan studinya secara daring atau pergi ke negara lain.

"Insya Allah saya akan melanjutkan studi saya dengan cara apa pun. Saya memulai studi online. Dan, jika tidak berhasil, saya harus meninggalkan negara ini dan pergi ke negara lain," katanya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengukuti keputusan itu. Dia menyebutkan Taliban telah melanggar janjinya. "Sulit membayangkan bagaimana suatu negara dapat berkembang, dapat menghadapi semua tantangan yang dimilikinya, tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan," ujarnya.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan, Taliban tidak bisa berharap menjadi anggota masyarakat internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan. Kursi PBB di Afghanistan masih dipegang oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan Presiden Ashraf Ghani.

Permintaan Taliban untuk mewakili Afghanistan di PBB belum lama ini kembali ditanggguhkan. Kuasa Usaha Afghanistan, Naser Ahmed Faiq mengatakan, pengumuman itu menandai titik terendah baru dalam pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar dan universal untuk seluruh umat manusia.

Sejak kembali mengambil alih Afghanistan, Taliban menjanjikan aturan yang lebih moderat, termasuk menghormati hak-hak perempuan dan minoritas. Namun Taliban secara luas menerapkan interpretasi mereka yang ketat terhadap hukum Islam, atau Syariah.

Taliban telah melarang anak perempuan mengenakan pendidikan di sekolah menengah atas. Taliban membatasi perempuan untuk bekerja, dan memerintahkan mereka mengenakan pakaian yang menutup kepala hingga ujung kaki atau burqa di depan umum. Perempuan juga dilarang pergi ke taman dan pusat kebugaran. Taliban digulingkan pada tahun 2001 oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat karena melindungi pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan setelah penarikan pasukan pimpinan Amerika tahun lalu. ● gul

Kelompok Bersenjata Bunuh 38 Warga di Nigeria

KADUNA(IM) -- Orang bersenjata membunuh 38 warga desa di Negara Bagian Kaduna, Nigeria. Daerah barat laut itu dilanda kekerasan bersenjata. Warga desa dan kelompok komunitas lokal mengatakan serangan di mulai pada Senin (19/12) malam.

Juru bicara Serikat Masyarakat Kaduna Selatan (SKPU) Luka Binniyat mengatakan serangan berlanjut hingga Selasa (20/12), orang-orang bersenjata menembak warga dan membakar sekitar 100 rumah. Seorang warga Jasen Joseph mengatakan pelaku membunuh beberapa orang dengan golok.

"Saya kehilangan banyak teman, paman, orang tua dan mentor di satu tempat, bila anda turun, dua jalan, anda akan melihat mayat di mana-mana," katanya, Selasa (20/12). Binniyat mengatakan selama lima hari sampai Senin kemarin 46 orang tewas dalam serangan tanpa provokasi di selatan Kaduna. Sukarelawan mencari orang yang masih hilang.

Warga mengatakan beberapa hari sebelum serangan terjadi mereka melihat "pengembala aneh" berke-mah di dekat desa. "Ribuan warga dari dua komunitas yang hancur dan desa sekitarnya berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka sebagai (pengungsi internal) ke daerah yang mungkin dirasa aman," kata Binniyat dalam pernyataannya.

"Kami mengancam pemberontakan pembunuhan massal dan meminta pemerintah bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan properti dengan sangat serius atau harus hanggang," tambahnya. ● ans

PBB Sebut Taliban Tolak Dialog Antarkelompok di Afghanistan

NEW YORK(IM) - Perwakilan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan Roza Otunbayeva mengatakan, Taliban menolak perlunya segala jenis dialog intra-Afghanistan dalam membentuk pemerintahan yang inklusif. Dalam penjelasan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, dia mengatakan, otoritas de facto negara itu menganggap pemerintahnya cukup representatif.

Otunbayeva juga menyatakan keprihatinannya atas aktivitas ISIS Khorasan (ISIS-K atau ISIL-KP) di Afghanistan. "Taliban pada dasarnya tetap mengendalikan negara tetapi tidak dapat menangani kelompok teroris yang beroperasi di dalam Afghanistan dengan memusnahkan," kata Otunbayeva dikutip dari Anadolu Agency.

Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada DK PBB melukiskan gambaran suram tentang situasi kemanusiaan di Afghanistan. Dia mengatakan bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang tercabik-cabik itu dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya menangguk bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai tujuh miliar dolar AS sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban. Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta AS untuk mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan. ● gul

PT SINAR MULIA ANUGERAH AGUNG
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN

Direksi PT Sinar Mulia Anugerah Agung, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan hendak menerbitkan 3.420 saham baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Goku Resources, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang merupakan konversi utang Perseroan kepada PT Goku Resources menjadi setoran modal.

Penerbitan Saham Baru tersebut akan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 22 Desember 2022

Direksi
PT SINAR MULIA ANUGERAH AGUNG



IDN/ANTARA

PASOKAN DAN TRANSPORTASI OBAT ANTIPIDEMI

Seorang karyawan mendaftarkan informasi obat-obatan di pusat logistik apotek di Distrik Kaifu, Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok, Selasa (20/12). Apotek di Changsha bekerja untuk memastikan pasokan dan transportasi obat antiepidemi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat